

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMEDASI

6.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa komunitas mempunyai peranan penting dalam pengembangan objek dan daya tarik wisata. Keberadaan komunitas, jika diberdayakan secara optimal, akan mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Hal ini terbukti di Jalan Jaksa, dimana wisatawan datang berkunjung karena interaksi sosial yang terjadi antara wisatawan dengan komunitas lokal. Dari sudut pandang sosiologi, khususnya sosiologi pariwisata, hal ini menjadi bukti bahwa pariwisata adalah salah satu kajian yang harus dikembangkan dari pariwisata. Sosiologi pariwisata, merupakan sebuah kajian interdisipliner antara ilmu sosiologi dan ekonomi. Karena berdasarkan hasil penelitian, keberadaan Jalan Jaksa tersebut membuktikan bahwa pariwisata bisa berkembang hanya jika ada komunitas lokal yang mendukung keberadaan objek dan daya tarik wisata tersebut. Jika ditelusuri lebih jauh bertahannya objek dan daya tarik wisata tersebut penyebab utamanya adalah aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh komunitas lokal tersebut, yakni penyediaan jasa dan produk wisata bagi para wisatawan.

Oleh karena itu, hasil penelitian ini merupakan bukti ilmiah bagi para *stakeholders* terkait untuk menjadikan perencanaan pembangunan kota di Jakarta mempunyai karakter khas yang membedakan dengan kota-kota lain, dengan mengarahkan pembangunan kota Jakarta Pusat sebagai kota wisata berbasis komunitas. Untuk itu berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan berbagai hal penting untuk mendukung terwujudnya Kota Wisata Jakarta Pusat. *Pertama*, bahwa modal sosial adalah faktor pendukung yang sangat penting bagi pengembangan pariwisata di Kota Jakarta Pusat. Tanpa adanya modal sosial tersebut, maka perkembangan kawasan wisata tidaklah akan berhasil secara optimal. Modal sosial tersebut merupakan pelumas bagi masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan pariwisata. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diidentifikasi 5 modal sosial. 2 modal sosial yang diajukan dapat

diterima yakni organisasi komunitas dan aktivitas ekonomi. 1 Modal sosial direvisi, dari kepercayaan menjadi kepercayaan terhadap figur. 2 asumsi modal sosial ditolak, yakni proses pembelajaran sosial dan sarana dan prasarana wisata. Penolakan dua modal sosial tersebut karena ditemukan modal sosial lain yang lebih berpengaruh, yakni penerimaan komunitas lokal terhadap wisatawan dan jejaring sosial di antara penduduk dan wisatawan.

Kemudian proses pembangunan dan manajemen pariwisata di Jalan Jaksa pun, telah mengalami berbagai macam perubahan pola. Bermula dari sporadis, kemudian diorganisasi oleh satu organisasi, yakni Ikatan Usaha Kepariwisataan Jalan Jaksa dan Sekitarnya, sampai dengan pengelolaan dibawah manajemen pemerintah kotamadya Jakarta Pusat. Apapun pola pembangunan yang dilakukan terlihat berdasarkan data tidak ada satupun rencana strategi pembangunan yang dibuat baik oleh pemerintah maupun komunitas lokal. Sehingga, pola pembangunan yang terjadi lebih kepada pola pembangunan sporadis, isidental dan tanpa target yang jelas. Untuk itu komunitas-komunitas lokal yang ada disekitar Jalan Jaksa haruslah diberdayakan, sebagai aktor utama pengembangan kawasan objek dan daya tarik wisata. Pemberdayaan komunitas tersebut menjadi memungkinkan karena komunitas tersebut mempunyai modal sosial yang sangat mendukung bagi pengembangan objek dan daya tarik wisata. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan lima modal sosial yang dominan, yakni kepercayaan terhadap figur, organisasi komunitas, aktivitas ekonomi, penerimaan warga lokal dan jejaring sosial. Lima Modal dasar tersebut harus dijadikan dasar permesatu komunitas, untuk membuat sebuah industri pariwisata komunitas. Industri komunitas inilah yang kemudian secara intens mengembangkan produk dan jasa wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang datang. Produk dan Jasa ii haruslah selalu ditingkatkan, berdasarkan keinginan dan kebutuhan wisatawan. Jangan sampai para wisatawan tidak terpuaskan keinginannya. Selanjutnya industri pariwisata lokal tersebut haruslah difasilitasi oleh pemerintah untuk menjalin kerjasama strategis dengan perusahaan pariwisata skala menengah besar. Diharapkan dari kerjasama tersebut, akan terjadi peningkatan kesejahteraan bagi komunitas lokal dan secara otomatis akan menjadi pusat ekonomi baru di wilayah Jakarta Pusat.

Kemudian berdasarkan hasil temuan lapangan terhadap pola manajemen yang selama ini dilakukan pelaku pariwisata terhadap kawasan wisata malam Jalan Jaksa dan lima modal sosial yang inheren ada dalam komunitas Jalan Jaksa, terdapat perubahan kerangka pembangunan kota wisata Jakarta Pusat. Perubahan tersebut diwakilkan dalam diagram dibawah ini.

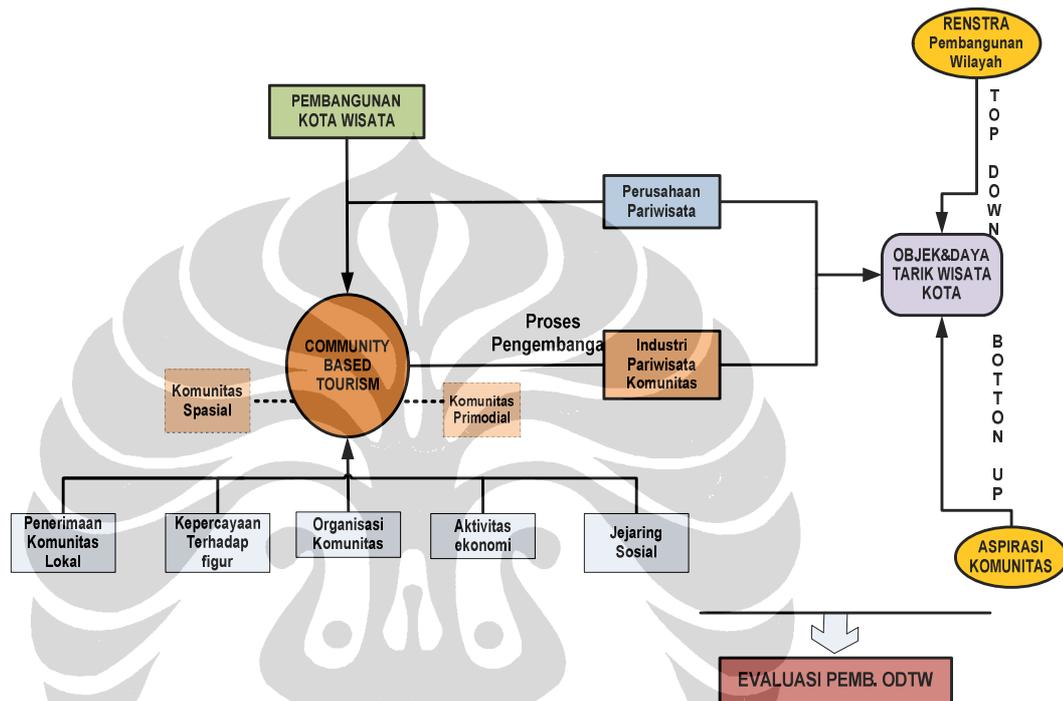


Diagram 6.1

Rencana Strategi Pembangunan Kota Wisata Berbasis Komunitas

Rencana pengembangan tersebut tidak bisa terbatas kepada pengembangan spasial, melainkan harus pengembangan wilayah Jakarta Pusat secara keseluruhan. Proses perencanaan tersebut harus mengabungkan beberapa kawasan wisata yang ada di Jakarta Pusat sebagai sebuah kesatuan untuk mewujudkan Jakarta Pusat sebagai kota wisata. Prinsip utama dalam melakukan pembangunan kota wisata Jakarta Pusat adalah dengan melakukan pemberdayaan komunitas lokal, melalui pengembangan industri pariwisata komunitas. Setidak ada sepuluh kebijakan dan berbagai program pendukung yang perlu ditempuh untuk mewujudkan kota wisata Jakarta Pusat, antara lain:

Tabel 6.1. Kebijakan dan Program Pembangunan Kota Wisata

Kebijakan	Program
Identifikasi dan Pemetaan ODTW	1. Pendataan Kembali ODTW di Jakpus
	2. Study Potensi Pariwisata (Sosial-Ekonomi)
	3. Klasifikasi ODTW yang layak dikembangkan
	4. Pengembangan Sarana dan Prasarana Wisata di ODTW
Mobilisasi dan Pemberdayaan Komunitas	1. Identifikasi Komunitas Sekitar ODTW
	2. Peran Individu dan Komunitas dalam proses pengembangan ODTW ditingkatkan secara aktif, sebagai aktor utama
	3. Pemantapan Kelompok sosial yang lebih permanen, seperti keluarga, RT/RW, karang Taruna
	4. Bentuk Organisasi Swadaya yang dibangun sebagai tanggapan terhadap kepentingan dan kebutuhan khusus sesuai dengan keadaan
Identifikasi Modal Sosial Komunitas	1. Buat Kelompok Diskusi antar Individu dalam Komunitas sekitar ODTW
	2. Survey Modal Sosial Masyarakat
	3. Pemilahan dan Penetapan Modal Sosial berdasarkan hasil Diskusi dan Survey oleh Komunitas
Identifikasi Potensi Ekonomi ODTW	1. Survey Potensi ODTW (Sarana dan Prasarana, Produk wisata, prospek masa depan, dll)
	2. Survey Potensi Ekonomi (Aktivitas Ekonomi, Atraksi Wisata, Jumlah Kunjungan Wisatawan, Dampak terhadap kesejahteraan Masyarakat)
Identifikasi Visi dan Tujuan Pembangunan ODTW	1. Buat Kelompok Diskusi antar Individu dalam Komunitas sekitar ODTW membahas Visi dan Tujuan
	2. Survey Harapan Masyarakat terhadap pengembangan ODTW
	3. Pemilahan dan Penetapan Visi dan Tujuan berdasarkan hasil Diskusi dan Survey oleh Komunitas

Pengembangan Industri Pariwisata Komunitas	1. Pembentukan industri Pariwisata komunitas yang dibangun dengan tujuan pemenuhan hak dan kebutuhan ekonomi komunitas
	2. Program Pelatihan Kewirausahaan
	3. Peningkatan Kapasitas Industri Pariwisata
	4. Pemberian Bantuan Modal Usaha
	5. Bantuan Akses, Informasi dan Pemasaran Produk Wisata Industri Pariwisata Komunitas
Identifikasi Produk Wisata	1. Analisa Komperhensif Produk Wisata
	2. Analisa Kelemahan dan Kelebihan Produk Wisata ODTW
	3. Study Segmentasi Wisatawan
	4. Pengembangan Produk Wisata
Optimalisasi Dukungan Pemerintah	1. Pembuatan Peraturan Daerah untuk mendukung Pengembangan Jakpus Sebagai Kota Wisata
	2. Pembuatan Peraturan Daerah untuk mendukung Pengembangan Industri Pariwisata Komunitas
	3. Pembuatan Rencana Strategis Pengembangan Kota Wisata
	4. Pengembangan Sarana dan Prasarana Wisata di ODTW
Sinergisitas Pelaku Pariwisata	1. Pembuatan Produk Wisata antar industri pariwisata komunitas
	2. Kerjasama Strategis antar Perusahaan Pariwisata dan Industri Pariwisata Komunitas
	3. Bantuan Teknis Sukudinas Pariwisata terhadap pengembangan ODTW
Penyatuan ODTW	1. Pembuatan Program Wisata antar Kawasan Objek dan Daya Tarik Wisata, contohnya (Pesta Wisata Jakarta Pusat, Pesta Kuliner, dll)
	2. Penyatuan kawasan Objek dan Daya Tarik Wisata dalam satu Jaringan Transportasi, contohnya Program City Tour Jakarta Pusat
	3. Kerjasama antar Industri Pariwisata Komunitas dalam sebuah wadah tingkat kotamadya Jakarta Pusat

Berdasarkan sepuluh kebijakan tersebut, terlihat bahwa fungsi pemerintah diposisikan sebagai pendukung dari keberadaan industri pariwisata komunitas. Dimana, peranan utama akan lebih ditekankan kepada komunitas lokal. Komunitas dipilih sebagai pilar utama pembangunan pariwisata, dikarenakan komunitas tersebut mempunyai modal sosial yang mendukung bagi terbentuknya industri pariwisata komunitas.

Hasil penelitian juga membuktikan bahwa pembangunan perkotaan berdasarkan sistem jejaring kota tersebut haruslah dimulai dari sub-wilayah ekologis terkecil dalam level kota. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan kota wisata adalah komunitas wilayah Objek dan Daya Tarik Wisata. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa fungsi kota untuk memenuhi kebutuhan hidup warganya hanya bisa terwujud apabila terjadinya pengembangan aktivitas ekonomi di tingkat komunitas lokal. Aktivitas ekonomi dan hasil aktivitas tersebut akan mendorong terciptanya sentral-sentral ekonomi baru, dalam sub-wilayah komunitas tertentu dalam sebuah pemukiman. Inilah yang disebut dengan pemukiman ekonomi terpadu. Pertumbuhan kawasan Objek dan Daya Tarik Wisata dengan segala jejaringnya dan simpulnya, yang diikuti dengan penciptaan sarana dan prasana wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, dalam sub-wilayah komunitas tersebut akan menciptakan sub-wilayah kota yang mandiri.

6.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka ada beberapa rekomendasi bagi Pengembangan Kota Wisata Berbasis Komunitas:

6.2.1. Rekomendasi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, cq. Kotamadya Jakarta Pusat

1. Pemerintah Kota Jakarta Pusat harus dengan segera merubah pola pembangunan kota yang sifatnya *top-down* dan sentralistik kepada pola pembangunan kota partisipatoris dengan melibatkan komunitas dalam setiap perencanaan pembangunan kota. Dengan adanya dukungan komunitas, bagi pelaksanaan program pembangunan akan lebih sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak adanya tentangan dari masyarakat.

2. Pembuatan dan atau penyesuaian regulasi atau peraturan perundang-undangan untuk mendukung terwujud kota Jakarta Pusat sebagai Kota Wisata..
3. Peningkatan kinerja kelembagaan di level aparaturnya agar lebih efektif dan efisien khususnya suku dinas pariwisata Jakarta Pusat.
4. Pemerintah membentuk sebuah organisasi atau team kerja khusus yang fungsi utamanya untuk mengkaji penerapan pembangunan kota Jakarta Pusat sebagai Kota Wisata. Team ini terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha dan perwakilan komunitas. Target team ini haruslah dapat membuat roadmap pembangunan kota wisata Jakarta Pusat dalam jangka pendek, menengah dan panjang.
5. Pemerintah perlu dengan segera membuat masterplan pengembangan Kota Wisata Berbasis Komunitas. *Masterplan* tersebut harus secara tegas, jelas dan implisit memuat tahapan-tahapan yang harus dilakukan dengan target yang terukur, dengan titik pemberdayaan terhadap industri komunitas pariwisata di kawasan objek dan daya tarik wisata.
6. Keberadaan kawasan objek dan daya tarik wisata yang telah ada, harus dengan segera dilakukan revitalisasi dan ditangani oleh team kerja khusus, untuk kembali dilakukan penyegaran kondisi objek dan daya tarik wisata. Karena, keberadaan kawasan wisata yang ada di Jakarta Pusat terkesan tidak dirawat dengan baik. Penyegaran tersebut bisa dilakukan baik dari infrastruktur, produk dan atraksi wisata serta jasa pendukung wisata.
7. Pemerintah harus turun tangan secara aktif mendukung bagi pengembangan industri pariwisata komunitas dengan berbagai cara. Misalnya memberikan bantuan modal kepada industri pariwisata komunitas dan memberikan akses informasi, ketrampilan wirausaha dan menjembatani kerjasama strategis antara perusahaan pariwisata dengan industri lokal.
8. Pengembangan kawasan objek dan daya tarik wisata haruslah dilakukan dengan pertimbangan perkembangan satu kawasan kotamadya, jangan hanya fokus terhadap beberapa kawasan.

9. Upaya-upaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana wisata kawasan objek dan daya tarik wisata harus terus dilakukan, sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan wisata yang nyaman, aman, dan bersih bagi para wisatawan.
10. Pemerintah lebih gencar untuk mengadakan kegiatan atraksi wisata bersama komunitas lokal yang ada di kawasan objek dan daya tarik wisata. Jangan terpaku kepada kegiatan yang sifatnya seremonial belaka, namun tidak mempunyai relevansi positif terhadap perkembangan wisatawan yang data dan peningkatan masyarakat lokal.
11. Pemerintah harus secara progresif membantu pemasaran kawasan objek dan daya tarik wisata, baik melalui media elektronik dan media maupun promosi *below the line*. Promosi yang efektif dan tepat sasaran akan sangat membantu bagi peningkatan kedatangan wisatawan ke kawasan objek dan daya tarik wisata.

6.2.2. Rekomendasi Kepada Komunitas

1. Anggota komunitas atau masyarakat di sekitar objek dan daya tarik wisata harus dengan segera melakukan mobilisasi anggota komunitas untuk dengan segera membentuk wadah organisasi legal formal.
2. Anggota komunitas disekitar objek dan daya tarik wisata harus dengan segera melakukan pemberdayaan terhadap anggota komunitasnya. Pemberdayaan bisa berupa pemberian pelatihan wirausahaan dan sejenisnya.
3. Anggota komunitas yang tergabung dalam organisasi komunitas harus dengan segera melakukan identifikasi visi dan tujuan Pembangunan Obyek dan daya tarik wisata. Jangan sampai pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai komunitas.
4. Organisasi komunitas tersebut harus dengan segera membentuk industri pariwisata komunitas sebagai wadah aktivitas ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan wisatawan yang datang berkunjung ke lokasi objek dan daya tarik wisata.

5. Industri pariwisata komunitas harus dengan segera melakukan identifikasi produk wisata apa saja yang dapat dikembangkan untuk menarik kedatangan wisatawan ke lokasi objek dan daya tarik wisata.
6. Menjalinkan kerjasama strategis dengan lembaga-lembaga terkait untuk dapat kaitannya untuk mengembangkan kawasan objek dan daya tarik wisata. Lembaga tersebut bisa lembaga pemerintah, swasta dan perusahaan pariwisata. Diharapkan dari kerjasama tersebut akan terwujud hubungan yang saling menguntungkan diantara pelaku usaha pariwisata.

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini dan berbagai rekomendasi diatas, sebagai penutup dapatlah dikemukakan bahwa secara konseptual dan empirik pendekatan pembangunan kota pariwisata berbasis komunitas perlu dijadikan sebagai *mainframe* utama dalam pembangunan kota di Indonesia. Karena, secara teoritis, pembangunan kota pariwisata akan mampu meningkatkan taraf kehidupan komunitas di sekitar objek dan daya tarik wisata. Hal ini hanya bisa dilakukan apabila kebijakan, program, dan strategi pemerintahan serta dunia usaha mendukung pembangunan pariwisata berbasis aset dan menyediakan akses dana bagi mereka. Pada saat pembangunan pariwisata berbasis komunitas dilaksanakan, maka masyarakat mulai berpikir jangka panjang dan melakukan upaya-upaya akumulasi aset yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap usaha pengentasan kemiskinan. Pada akhirnya dampak ekonomi dari pariwisata akan lebih terdistribusikan secara merata di masyarakat dan dana tersebut tidak lagi dimonopoli oleh segelintir orang.

